

BAB III

PROSES JALANNYA DIPLOMASI DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA

A. Proses Jalannya Diplomasi

Berbagai pertempuran lokal yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia merupakan sebuah wujud perlawanan rakyat terhadap aksi Kolonialisme Belanda. Belanda sangat membahayakan masa depan keberadaan Republik Indonesia. Keinginan Belanda bercokol di Indonesia setelah Perang Dunia II memiliki tujuan menjadikan Indonesia bagian dari negaranya. Belanda tidak ingin begitu saja kehilangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah-limpah untuk membangun kembali negaranya setelah Perang Dunia II yang ada di Indonesia.

Penjajahan Belanda yang telah terjadi selama berabad-abad menyebabkan rasa trauma bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Rakyat Indonesia yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 mulai melakukan pergolakan sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan terhadap pihak kolonial Belanda merupakan keinginan murni rakyat Indonesia, yang muncul dari atas kesadaran sebagai bangsa yang telah merdeka. Munculnya perjuangan fisik, perjuangan para pejuang, laskar dan tentara yang diawali oleh rasa kecemasan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Belanda di masa awal kemerdekaan. Sehingga menimbulkan keresahan juga pada pihak pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, oleh karena itu Letnan

Gubernur Jendral Dr. H. J. van Mook sebagai wakil Belanda di Indonesia menyadari situasi tersebut. Pergolakan rakyat harus segera diredam hingga Van Mook bersama direktur kabinetnya Dr. P. J. A Idenburg berinisiatif menawarkan suatu perundingan untuk menyelesaikan konflik kepada pihak Republik Indonesia. Van Mook menawarkan sebuah kerjasama, rencana tersebut ditolak oleh Soekarno Hatta dengan alasan mau bekerja sama apabila pemerintah Belanda setelah terlebih dahulu mengakui keberadaan Republik Indonesia sebagai pengakuan de facto. Penolakan tersebut menimbulkan reaksi negatif pemerintah Belanda di negeri Belanda. Kecemasan dan keresahan di kalangan politisi dan petinggi Pemerintah Belanda keras kepala, tetapi pada pendiriannya tidak akan mengakui kemerdekaan Indonesia karena hal tersebut berarti menyatakan diri telah mengintervensi sebuah negara merdeka. Namun selalu mendesak Indonesia untuk segera melaksanakan perundingan, dengan harapan dapat segera dibentuk sebuah Uni antara Belanda dan Indonesia demi masa depan yang lebih baik.

B. Berbagai Macam Perundingan.

1. Perundingan di Hoge Veluwe

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Belanda tidak bersedia mengakui keberadaan Republik Indonesia. Pemerintahan Den Haag menginginkan pemulihan kolonialisme

sejak akhir tahun 1945.¹ Melihat sikap rakyat Indonesia yang menentang mati-matian dengan perlawanan di berbagai daerah akibat rencana pemulihan koloni di wilayah Indonesia, sehingga menyebabkan perubahan sikap Belanda menyikapi keinginannya. Perubahan sikap Pemerintah Belanda mulai melunak, namun Den Haag hanya dapat menyetujui dekolonialisasi secara bertahap. Menyadari bahwa keinginan perubahan tata negara rakyat Indonesia –sebagaimana antara lain jelas dikemukakan dalam Petisi Soetardjo sebelum pecah Perang Pasifik- tak dapat dikesampingkan begitu saja, maka pada tanggal 10 Mei dari London, Ratu Wilhelmina berpidato. Baginda mengemukakan maksud beliau bahwa, bentuk daerah-daerah jajahan dan penentuan kedudukan jajahan-jajahan ini dalam Kerajaan, akan disesuaikan dengan tuntutan jaman.² Pada saatnya nanti Belanda akan mengakui hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri setelah dirasa telah mampu mengurus negaranya sendiri.

Dengan perantaraan Inggris sebagai pimpinan tertinggi Sekutu yang meliputi Asia Tenggara, diadakan perundingan antara Perdana Menteri Sutan Syahrir dan Letnan Gubernur Jendral H.J.Van Mook. Van Mook dianggap pilihan terbaik untuk melakukan perundingan dari pihak Belanda melihat karir politiknya di Indonesia beliau termasuk Kelompok Pendorong (Stuw Groep) yang menganggap bangsa Indonesia sudah

¹M.Sabir.*Politik Bebas Aktif Tantangan dan Kesempatan*.Jakarta.hlm.66

²Ide Anak Agung Gde Agung. *Renville*. Jakarta:Penerbit SinarMas,1983, hlm.22

mampu menentukan nasibnya sendiri. Permasalahan sendiri datang dari berbagai pihak baik di negeri Belanda dan Indonesia menanggapi upaya perundingan tersebut. Para politisi di kedua negara menentang adanya perundingan tersebut karena dirasa sama-sama merugikan baik itu dari pihak Belanda maupun Indonesia. Politisi pihak Belanda menolak pengakuan kedaulatan, serta adanya larangan untuk berunding dengan para pemimpin Republik seperti Soekarno dan Hatta. Hal itu tentu saja tidak mungkin, karena kedua tokoh tersebut adalah simbol Indonesia. Politisi Indonesia menginginkan pengakuan kemerdekaan langsung tanpa syarat dari pihak Belanda. Begitu juga usul-usul yang diajukan oleh Van Mook tidak tegas dan menyebutkan hadirnya Republik Indonesia tentu saja ditolak oleh partai-partai politik yang diwakili di KNIP. Ditambah perselisih karena perbedaan paham terhadap kebijakan politik Syahrir dengan golongan kiri. Golongan tersebut merupakan kelompok yang bergabung dalam persatuan perjuangan di bawah pimpinan Tan Malaka dan Soetono. Mereka hanya menghendaki perjuangan fisik untuk mengusir Belanda dan Inggris.³

Pemerintah Belanda mempersalahkan kehadiran Soekarno dan kawan-kawannya dalam perundingan, Soekarno dianggap kolaborator Jepang. Hal ini menimbulkan keributan yang cukup besar di Parlemen Negeri Belanda sampai hampir saja Van Mook akan dipecat dari jabatannya sebelum dicegah oleh Ratu Wilhelmina. Belanda hanya

³ George MC Turnan Kahin, *Nasionalisme & Revolusi*, Pustaka Sinar Harapan, 1995 hlm. 190.

menginginkan kehadiran Sutan Syahrir sebagai wakil Indonesia dalam perundingan karena pandangan politiknya yang lebih santun dan mengedepankan diplomasi. Bahkan setelah pada tanggal 14 November 1945 yang mendudukan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri menuntut kekuasaan dan kedaulatan di seluruh Hindia Belanda. Van Mook sebagai wakil Belanda menyadari bahwa permintaan tersebut akan menyebabkan kekerasan hati Pemerintah Belanda tidak mungkin dapat menyetujui dan akan menyebabkan kemacetan usaha dialog yang selama ini dilakukan. Akan tetapi Van Mook tidak menginginkan pemberhentian dialog dengan Perdana Menteri Syahrir, karena menurut pendapatnya hanya Syahrir petinggi Republik yang paling berakal sehat dalam menyikapi perundingan. Walaupun Negeri Belanda tetap pada pendiriannya tentang pemulihan kembali Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sebelum tahun 1942 bertentangan dengan usul-usul Syahrir dalam perundingan. Syahrir menginginkan sebelum perundingan tetap adanya pengakuan terlebih dahulu terhadap eksistensi Republik Indonesia. Van Mook berusaha meyakinkan Pemerintah Belanda atas syarat yang diajukan Soekarno dari Indonesia dapat diterima sebagai jalan perundingan lebih baik.

Tindakan Van Mook telah memberikan dampak positif, tindakan Van Mook mendapat banyak dukungan terutama dari panglima tertinggi SEAC Lord Mountbatten, Pemerintahan Inggris di London dan Pemerintahan Amerika Serikat di Washington. Mereka menginginkan adanya suatu perdamaian antara Indonesia-Belanda. Tugas yang

dijalankan Van Mook ditentang oleh kabinet Belanda terutama Menteri Keuangan Belanda, P. Lieftinck dari SDAP (*Social Demokratische Arbeids Partij*) dan Menteri Dalam Negeri Dr. L. J. M. Beel dari RKSP (*Rooms Katholieke Staats Partij*) yang menginginkan terwujudnya restorasi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Perundingan yang membahas kehadiran pasukan Inggris yang sangat diperlukan selama perundingan berlangsung. Inggris tidak diizinkan menarik kembali pasukannya sebelum tanggal yang telah ditentukan oleh pemerintah Belanda.

Pemerintah Inggris mendorong segera dilangsungkannya perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Pemerintah Inggris telah mengancam akan menarik pasukannya jika perundingan tersebut terwujud. Jadi, dalam hal ini Inggris sebagai penengah dalam perundingan Indonesia-Belanda. Perundingan resmi dibentuk pada tanggal 13 Maret 1946 kemudian diteruskan pada tanggal 16 dan 17 Maret 1946. Delegasi Belanda adalah Perdana Menteri Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn dan delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir. Pihak Inggris bertindak sebagai penengah yang diwakili oleh Sir Archibald Clark Kerr (kemudian menjadi Lord inverchapel). Perundingan-perundingan itu dilanjutkan di Hoge Veluwe Negeri Belanda. Perundingan membicarakan masalah pengakuan kedaulatan Indonesia dan penyelesaian masalah politik di Indonesia dan didasarkan atas persetujuan antara Syahrir dan Van Mook terlebih dahulu. Menurut Van Mook, penyelesaian masalah

politik harus dibicarakan terlebih dahulu, menurutnya kemelut dalam politik dapat menghalangi jalannya perundingan ke arah penyelesaian. Sir Archibald Clark Kerr sebagai penengah berhasil meyakinkan kedua belah pihak.⁴

Akhirnya, kerjasama antara pihak Indonesia dan pihak Belanda terbentuk dalam panitia kecil rapat pleno. Keselapahaman antara Indonesia-Belanda baru berhasil pada tanggal 27 Maret 1946 yang dikenal dengan Naskah Persetujuan Pendahuluan. Naskah ini dijadikan titik tolak dalam perundingan selanjutnya antara pihak Belanda dan Indonesia. Naskah persetujuan pendahuluan tersebut ditandatangani oleh Soetan Syahrir dan Van Mook pada tanggal 30 Maret 1946 yang dikenal dalam sejarah sebagai “Batavia Concep” atau Rumusan Jakarta.⁵

Namun ternyata naskah yang telah ditandatangani Syahrir dan Van Mook tidak disetujui oleh pemerintah Belanda. Belanda beranggapan bahwa naskah persetujuan pendahuluan dalam persetujuan Hoge Veluwe tidak sesuai dengan harapan Belanda. Betapapun optimisme Van Mook dan delegasi Indonesia untuk dapat mencapai suatu hasil positif, sebagai dasar bagi perubahan-perubahan politik dan ketatanegaraan selanjutnya di Indonesia dan untuk dapat menempatkan hubungan Indonesia-Belanda dalam suatu perspektif baru, namun pembicaraan-pembicaraan Hoge

⁴ Dr.A.H.Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Periode Linggarjati*, Penerbit Angkasa Bandung,hlm.4

⁵ Ibid.hlm.71

Veluwe diakhiri dengan kegagalan yang menyeluruh.⁶ Hal ini mempersulit kedua belah pihak untuk melanjutkan perundingan lebih lanjut. Melihat situasi tersebut pemerintah Inggris mendesak perundingan antara Indonesia-Belanda harus dilanjutkan demi tercapainya penyelesaian masalah politik di Indonesia. Pemerintah Inggris mendesak Pemerintah Belanda untuk menyetujui naskah tersebut sehingga perundingan antar kedua belah pihak dapat dilaksanakan secepatnya. Perundingan untuk membicarakan lebih lanjut naskah persetujuan pendahuluan yang belum mendapat kesepakatan akan dibicarakan pada perundingan selanjutnya di Hoge Veluw atau dikenal dengan perundingan Hoge Veluwe. Perundingan Hoge Veluwe diadakan pada tanggal 14 April 1946 dihadiri oleh Van Mook bersama tiga pejabat tinggi Indonesia dan Lord Inverchaple yang awalnya bernama Sir Archibald Clark Keer sebagai penengah dalam perundingan tersebut mencapai kesepakatan.

Perundingan Hoge Veluwe yang telah mencapai kesepakatan ternyata menimbulkan pertentangan di negeri Belanda. Pemerintah Belanda dan kabinetnya tidak menyetujui isi persetujuan tersebut. Belanda menentang disejajarkan kedudukannya dengan Indonesia. Hal ini akan memengaruhi pemilihan umum yang sedang diadakan di negeri Belanda. Banyak golongan politik di Belanda yang menentang diadakannya perundingan dengan Indonesia. Dalam perundingan tersebut, delegasi Belanda mengajukan gagasan Protokol. Gagasan tidak disetujui oleh

⁶ Ide Anak Agung Gde Agung. *Renville*. Jakarta: Penerbit SinarMas,1983 ,hlm.28

Soewandi, delegasi dari Indonesia. Gagasan Protokol yang berbeda dengan naskah persetujuan pendahuluan juga berbeda. Persetujuan Hoge Veluwe yang memuat bentuk perjanjian. Bagi Prof. Dr. Ir. W. Schemerhorn maupun Prof. Dr. J.H. Logemann bentuk perjanjian sangat bertentangan dengan UUD Belanda dan partai politik di negeri Belanda khususnya partai keagamaan di Majelis Rendah (Tweede Kamer) yang tidak menghendaki adanya perundingan. Hanya karena masalah perbedaan isi antara protokol dan naskah persetujuan pendahuluan kesepakatan perundingan antara Indonesia-Belanda tidak tercapai sepenuhnya. Naskah Protokol dan naskah persetujuan pendahuluan dianggap telah merugikan masing-masing pihak sehingga tidak dapat diterima. Dilihat dari permasalahan tersebut, perundingan Hoge Veluwe telah dinyatakan setengah gagal karena tidak semua naskah memberikan penyelesaian antara kedua belah pihak. Dalam hal tersebut, Belanda akhirnya memberikan pengakuan *de facto* atas Republik Indonesia hanya untuk pulau Jawa dan Madura saja, tetapi tidak untuk pulau Sumatera.

Kegagalan itu tampaknya disengaja oleh Belanda. Belanda menunggu perkembangan sampai pemilihan umum untuk dapat menentukan arah kebijakan negara di bulan Mei 1946 selesai di laksanakan di negerinya. Selain itu, kegagalan juga disebabkan adanya pertentangan-pertentangan yang kuat dari pihak Belanda maupun Inggris. Pengakuan *de facto* yang telah diberikan Belanda kepada Indonesia merupakan titik terang dalam perundingan Hoge Veluwe. Perundingan

akan dilanjutkan pada perundingan selanjutnya, hasil Perundingan Hoge pada perkembangannya selanjutnya dijadikan sebagai tonggak sejarah perjalanan perundingan yang akan datang bagi kedua belah pihak.⁷

Kegagalan perundingan Hoge Veluwe sebagai unsur kesengajaan yang diprakarsai oleh pemerintah Belanda. Alasan yang dikemukakan, Belanda akan mengadakan pemilihan umum di negerinya. Permasalahan dalam perundingan tersebut akan menjadi pokok pertentangan dalam kampanyenya. Pada tanggal 17 Mei 1946 di negeri Belanda sudah ada kampanye pemilihan umum untuk anggota parlemen. Seperti biasa banyak partai yang turut dalam pemilihan umum, akan tetapi kelompok yang terbesar adalah kelompok Katolik dan Sosialis. Dalam menghadapi pemilu Partai Katolik (RKSP) telah mengubah diri menjadi Partai Rakyat Katolik atau Khatolieke Volks Partij (KVP). Partai Sosialis (SDAP) menjadi Partai Buruh (Partij Van De Arbeid) (PVDA).⁸

Kedua Partai KVP dan PVDA memiliki pemahaman politik yang berbeda dalam menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Meskipun berbeda kedua partai akan bekerjasama dalam membentuk suatu koalisi kabinet. Keduanya diserahi tugas penting, tugas difokuskan pada pemecahan masalah politik di Indonesia, perbedaan faham kedua partai tersebut menyebabkan kompromi yang dihasilkan tidak jelas. Keduanya menyadari hal tersebut dan berusaha mengatasinya. Untuk itu dibentuklah

⁷ Sidik Suraputro,D,(1991),*Revolusi Indonesia Dan Hukum Internasional*. UI Press:Jakarta.hlm.40

⁸ Ide Anak Agung Gde Agung.Renville.Jakarta :Penerbit Sinar Mas,1983 ,hlm.20

suatu badan atau lembaga yang diberi nama Komisi Jenderal. Komisi Jenderal diberi tugas istimewa untuk meneruskan perundingan dengan pihak Republik Indonesia. Masalah pembentukan kabinet di Belanda menjadi kendala untuk mengadakan perundingan yang akan datang. Oleh Prof. W. Schermerhorn dijelaskan bahwa situasi politik di Belanda berubah. Setelah pemilihan umum terjadi perimbangan kekuatan antara kedua partai yang menang. Keduanya mempunyai perbedaan paham dalam menyelesaikan masalah Indonesia. Akan tetapi dalam perkembangannya hal tersebut dapat diatasi karena takut terjadi krisis kabinet lagi.

Perbedaan paham akhirnya dapat disatukan karena keduanya mempunya tekad untuk mencapai penyelesaian secara demokrasi dalam menangani masala Indonesia. Melihat situasi politik di Belanda tersebut, Pemerintah Inggris menganjurkan kepada Pemerintah Belanda agar secepat mungkin mengadakan penyelesaian politik dengan Pemerintahan Indonesia. Anjuran yang sama juga disampaikan oleh Logemann agar tidak melewatkkan kesempatan untuk berunding dengan pemerintah Indonesia.⁹

Inggris berpendapat, jika perundingan segera dilaksanakan dan agar dapat mencapai persetujuan maka pemulangan tentara Inggris untuk meninggalkan negara Indonesia dapat dilakukan dalam situasi yang damai. Usul yang diberikan oleh Pemerintah Inggris akhirnya diterima oleh Pemerintah Belanda. Situasi politik kedua belah pihak ternyata sangat

⁹ A.B.Lapian & P.J.Drouglever. *Menelusuri Jalur Linggarjati Diplomasi dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta : Grafiti. hlm.4

menentukan perundingan Indonesia dengan Belanda. Politik yang tidak stabil akan sulit untuk melanjutkan perundingan. Belanda lebih mengutamakan penyelesaian masalah politik di dalam negeri terlebih dahulu sebelum melanjutkan perundingan dengan Indonesia. Syahrir yang ditugaskan sebagai wakil dalam perundingan Hoge Veluwe dengan Belanda telah gagal karena macetnya perundingan. Kegagalan Syahrir terletak pada kebijakan politiknya yang saat itu ditentang dan dijadikan senjata partai-partai lawan politiknya di Indonesia. PNI dan Masyumi merupakan yang terbesar dan paling berpengaruh. Seperti PNI dan golongan kanan dalam Masyumi sangat menentang perundingan-perundingan dengan Pemerintah Belanda sebelum semua pasukan Belanda di Indonesia ditarik tanpa terkecuali. Kegagalan perundingan Hoge Veluwe akhirnya membawa delegasi Indonesia kembali ke Jakarta dengan tangan kosong tanpa hasil.

Partai-partai politik terutama PNI dan Masyumi menghendaki jatuhnya kabinet Syahrir, karena Syahrir tidak berhasil memperjuangkan prinsip-prinsip pengakuan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya menurut kedua partai tersebut. Tujuan tersebut didukung oleh pemuda-pemuda yang bersatu dalam suatu badan yang disebut Konsentrasi Nasional. Oposisi dari Konsentrasi Nasional ini semakin bertambah besar karena adanya pernyataan Menteri Legemann mengenai pemecahan masalah Indonesia yang disidangkan dalam Parlemen Belanda pada tanggal 2 Mei 1946. Pada sidang Parlemen Belanda tanggal 12 Mei 1946 tersebut tidak

dapat menerima usulan penyelesaian masalah Indonesia. Sebagai wujud tanggung jawabnya, Syahrir berkewajiban memberikan tanggapan untuk menjelaskan bahwa gagasan Belanda dalam konsep protokol tanggal 29 April 1946 dan pernyataan Logeman saat itu tidak disetujui Kabinet Syahrir. Terjadi ketegangan politik di Ibukota RI di Yogyakarta. Untuk mengatasinya, Presiden Soekarno mengambil alih kekuasaan kabinet dan mengumumkan keadaan darurat di seluruh pulau Jawa.

Akibat dari situasi tersebut Syahrir diculik oleh kelompok Soedarsono pada tanggal 27 Juli 1946. Akan tetapi, segera dibebaskan oleh Panglima Besar Soedirman atas saran Moh.Hatta kepada Soekarno ketika berada di Solo. Rencana penculikan yang dilakukan oleh Soedarsono di atas mendapat reaksi dari golongan Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang menjadi pendukung Syahrir. Jenderal Soedarsono yang mempunyai keinginan untuk menyampaikan tuntutan politiknya kemudian menemui Presiden Soekarno. Dalam pertemuan itu Jenderal Soedarsono menuntut dibubarkannya Kabinet Syahrir dan membentuk Kabinet baru yang beranggotakan PNI dan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Syahrir yang didukung oleh Pesindo akhirnya menuntut balas untuk menangkap Jenderal Soedarsono. Penangkapan tersebut dilakukan pada saat diadakannya pertemuan antara Jenderal Soedarsono dengan Presiden Soekarno. Penangkapan terhadap Jenderal Soedarsono justru mendapat reaksi dari Panglima Besar Jendral Soedirman.

Oleh karena itu pada tanggal 3 Juli 1946 malam diadakan pertemuan antara Presiden Soekarno dan Panglima Besar Jendral Soedirman dan dalam pertemuan itu Presiden Soekarno menjelaskan bahwa untuk kepentingan Nasional Jendral Soedarsono dan kawan-kawannya harus diamankan. Akhirnya Panglima Besar Soedirman menyetujui tindakan Soekarno, akan tetapi beliau mengajukan suatu syarat agar Soekarno membubarkan Kabinet Syahrir.¹⁰

Presiden Soekarno menerima tuntutan Panglima Besar Soedirman, tetapi menteri-menteri dalam Kabinet Syahrir diberi wewenang untuk terus menjalankan tugasnya masing-masing kekuasaan pemerintahan hingga pada akhirnya dijalankan kembali oleh Soekarno. Pemerintahannya berlangsung sampai tanggal 2 Oktober 1946. Setelah Kabinet Syahrir II dibubarkan, pada tanggal 20 September 1946 pemerintah Belanda mendesak untuk menghidupkan kembali perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda. Presiden Soekarno yakin bahwa jika Kabinet Presidensiil diteruskan maka pimpinan perundingan dipihak Republik Indonesia adalah Soekarno sendiri. Belanda tidak dapat menerimanya sebagai wakil dari Indonesia sebab hal itu akan menimbulkan banyak resiko kepada kedudukannya.

Jika perundingan itu gagal, golongan-golongan politik akan menyalahkan Soekarno dan menjadi bumerang untuk menghancurkan dirinya. Hal tersebut tentu akan mengurangi wibawa beliau di masyarakat

¹⁰ *Ibid*.hlm.77

terutama lawan politiknya. Satu-satunya yang dianggap cakap dan memenuhi syarat-syarat untuk menghadapi Belanda di meja perundingan ialah Syahrir sendiri. Syahir sudah sejak lama memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan-perundingan dengan pihak Belanda. Terutama mengenai masalah politik Indonesia, oleh karena itu Presiden Soekarno meminta kepada Syahrir untuk membentuk kabinet baru dan pada tanggal 2 Oktober 1946. Syahrir berhasil menyusun kabinetnya yang ketiga, Syahrir menjadi Perdana Menteri sebagai pembantunya diangkat Haji Agus Salim menjadi Menteri Luar Negeri. Jadi, dengan dibentuknya kabinet tersebut akhirnya masalah Indonesia diatasi. Perundingan yang akan diadakan diwakili oleh Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn dan Syahrir. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Inggris menunjuk Lord Killearn sebagai penengah dalam perundingan. Delegasi Republik terdiri dari Perdana Menteri Sutan Syahrir sebagai ketua, Menteri Perekonomian Dr. A.K. Gani, Menteri Pertahanan Mr. Amir Syarifudin, Menteri Dalam Negeri Mr. Soesanto Tirtoprodjo dan Mr. Muhamamad Roem sebagai wakil Masyumi sebagai anggota, sedangkan Mr. Ali Boediardjo sebagai sekertaris. Perundingan tersebut memasuki babak baru perjuangan diplomasi Indonesia-Belanda dalam perundingan.

Perundingan bertujuan menjelaskan situasi politik di negaranya masing-masing hingga menyebabkan macetnya perundingan awal. Hal ini memberikan titik terang sebagai langkah untuk membuka kembali perundingan antara Indonesia-Belanda. Perundingan Belanda-Indonesia

pada tanggal 7 Oktober 1946, sidang membahas tentang diadakannya gencatan senjata sementara waktu antara Indonesia-Belanda agar terciptanya iklim ketenangan. Hal tersebut memang taktik Lord Killearn untuk merintis jalan menuju perundingan politik dalam situasi damai dan tenang sesuai dengan tugasnya sebagai komisaris istimewa Inggris. Dalam perundingan tersebut, jalan ke arah kesepakatan politik diawali dengan persetujuan peletakan senjata yang ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 1946.

Kesepakatan yang dicapai pada sidang Indonesia-Belanda akhirnya ditandatangani oleh anggota Komisi Jeneral, Syahrir, dan Lord Killearn. Hasil perundingan tersebut merupakan sebuah ujian, apakah perundingan antara pihak Belanda dan Indonesia mengenai masalah-masalah politik dapat diselesaikan dalam perundingan selanjutnya. Usai sidang Indonesia-Belanda, perundingan selanjutnya dilaksanakan. Dalam perundingan tersebut masalah yang dibahas mengenai pembentukan Uni Belanda-Indonesia.

Hal tersebut dibicarakan dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dan Belanda pada tanggal 4 November 1946. Pembahasan masalah pembentukan Uni Belanda-Indonesia ternyata tidak mendapat persetujuan dari pihak delegasi Indonesia. Indonesia lebih menghendaki hubungan antara Indonesia-Belanda didasari pada persamaan derajat sesuai apa yang diinginkan oleh Ratu Wihellmina. Usul pemerintah Belanda mengenai pembentukan Uni Belanda-Indonesia tidak dapat

diterima oleh Syahrir karena usul tersebut sulit diterima oleh rakyat Indonesia. Akhirnya, masalah tersebut akan dibicarkan lebih lanjut pada tanggal 4 November 1946 dalam suatu perundingan yang disebut dengan perundingan Linggarjati.

2. Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati yang diadakan di Kuningan, Jawa Barat melahirkan kesepakatan berbentuk naskah persetujuan pada tanggal 15 November 1946. Bagi delegasi Indonesia, kesepakatan itu merupakan titik awal pengharapan rakyat Indonesia yang benar-benar berharap perdamaian telah tercapai. Belakangan diketahui bahwa ternyata Soekarno-Hatta tidak memahami pasal-pasal kesepakatan tersebut karena dalam perundingan Hoge Veluwe mereka tidak dihadirkan. Pasal-pasal dalam konsep persetujuan Belanda ada yang sudah disepakati, tetapi ada juga yang belum disepakati. Beberapa pasal yang masih belum disetujui akan dirundingkan kembali dalam perundingan di Kuningan.

Schermerhorn berpendapat agar pada pembicaraan dengan Soekarno dan Hatta nanti, Komisi Jenderal mengajukan hasil perundingan yang dilakukan dengan delegasi Indonesia. Pasal-pasal yang masih menjadi ganjalan akan dijelaskan kepada kedua otoritas tertinggi Republik Indonesia. Van Mook mengetahui psikologi bangsa Indonesia yang sangat menghargai istilah “kedaulatan” sebagai pengakuan bangsa yang memiliki kedaulatannya sendiri. Van Mook mengusulkan kepada Schermerhorn,

anggota Komisi Jenderal agar pada pembicaraan dengan Soekarno dan Hatta nanti perubahan istilah “yang merdeka” dari pasal konsep persetujuan Belanda diganti dengan istilah “berdaulat” seperti diusulkan oleh Syahrir. Usulan Van Mook yang melanjutkan usulan Syahir dapat diterima Komisi Jenderal, akan tetapi dengan syarat pihak Indonesia menerima rumusan pihak Belanda mengenai pasal 7, 9 dan 15. Saran Van Mook diterima baik oleh para anggota Komisi Jenderal. Hasil perundingan dengan Vak Mook dijelaskan oleh Schermerhorn kepada Soekarno. Schermerhorn menjelaskan bahwa masih ada pasal-pasal yang belum dapat disetujui oleh kedua belah pihak (pasal 2, 7, 9, dan 15).

Belanda menyetujui mengganti istilah “yang merdeka” dalam pasal 2 konsep persetujuan Belanda dengan istilah “berdaulat” dengan syarat pihak Indonesia menyetujui apa yang diinginkan Belanda untuk menerima rumusan pasal 7, 9, dan 15 sebagaimana diajukan oleh pihak Belanda.¹¹ Soekarno hanya memberikan reaksi bahwa dalam rumusan yang telah disetujui itu kedudukan Republik Indonesia. Di luar dugaan anggota Komisi Jenderal yang hadir, Soekarno dan Hatta menyambut gembira dan menerima saran Schermerhorn tersebut tanpa memberikan keberatan. Dua menteri RI yang turut serta dalam pemmbicaraan yaitu Mr.Sjafroeddin dan Dr.Gani menyetujui saran Schermerhorn walaupun keduanya hadir dalam perundingan dan rapat di Linggarjati yang seharusnya mengetahui arti dan bobot pasal 7, 9, dan 15. Keduaya dapat menilai apakah dengan

¹¹ A.B.Lapian & P.J.Drouglever.*op.cit*.hlm.4

diterimanya oleh pihak Belanda saran Indonesia untuk mengganti istilah “yang merdeka” dengan istilah “berdaulat” sudah selesai. Hasil kesepahaman antara Schermerhorn dengan Soekarno-Hatta akan dibawa dalam Perundingan Linggarjati.

Tanggal 13 November 1946 pukul 10.00 pagi kemudian dilangsungkannya sebuah rapat di Linggarjati antara delegasi Indonesia dan Belanda. Van Mook tidak dapat hadir karena beliau harus berada di Jakarta. Perundingan berjalan lancar, tidak timbul banyak kesulitan dalam kesepahaman antar pasal. Demikian pula pada pembahasan pasal krusial, Pasal 7 dan 9 ayat 2 tidak menimbulkan perdebatan alot. Pihak Indonesia dapat menerima redaksi dari kedua pasal yang dirumuskan oleh pihak Belanda. Misalnya mengenai ayat 1, pasal 15 pihak Belanda menyetujui redaksi yang diusulkan oleh Syahrir. Belanda-Indonesia menyepakati bahwa ayat 1 sudah cukup semua mewadahi persoalan yang disetujui bersama. Kedua pihak menyetujui pula untuk menghapus ayat 2 dan 3 pasal 15 sebagaimana dirumuskan oleh pihak Belanda.

Untuk mengubah sifat pemerintah Hindia, sehingga susunannya dan cara bekerjanya sesuai dengan pengakuan Republik Indonesia dan dengan bentuk susunan menurut hukum negara yang di pemerintah Belanda akan mengupayakan supaya dengan segera dilakukan aturan-aturan sesuai undang-undang. Agar segera terwujudnya negara Indonesia

Serikat dan persekutuan Belanda-Indonesia itu kedudukan negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan ini.¹²

Dapat disimpulkan bahwa perundingan Linggarjati sudah berhasil mewujudkan suatu naskah persetujuan antara pihak Indonesia dengan Belanda. Sekalipun masih ada masalah-masalah yang akan dirundingkan di Jakarta nanti, perundingan Linggarjati selesai. Komisi Jenderal menuju Cirebon untuk bertolak ke Jakarta dengan menumpang pesawat amphibie Catalina, kemudiaan rombongan Syahrir kembali ke Jakarta dengan mobil. Sekembalinya Komisi Jendral dari Linggarjati, persetujuan itu ditanda tangani oleh kedua orang ketua delegasi di rumah kediaman Syahrir di Jakarta pada tanggal 15 November 1946. Akhirnya naskah persetujuan Linggarjati dapat di tanda tangani kedua pihak pada rapat penutupan, pada pukul 13.30.¹³ Delegasi Belanda-Indonesia dan sepakat bahwa sore hari pukul 17.00 akan dilangsungkan upacara penandatanganan naskah persetujuan Linggarjati di kediaman PM Sutan Syahrir Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Perkembangan politik di Indonesia pada saat Komisi Jenderal tiba di Jakarta berbeda dibandingkan dengan saat naskah persetujuan Linggarjati ditandatangani pada 15 November 1946. Dengan ini pekerjaan kedua delegasi telah selesai dan menjadi tugas masing-masing parlemen untuk disetujui, baik di negeri Belanda Majelis Tinggi dan Majelis Rendah Parlemen Belanda (Staten

¹² Ide Anak Agung Gede Agung. *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*. Yogyakarta : Nusatama dan UI-Press.1995.hlm.105

¹³ A.b.Lapian & P.J.Drouglever.*op.cit*.hlm.4

Generaal) dan KNIP (Komisi Nasional Indonesia Pusat) bagi pihak Republik Indonesia. Baik di pihak Republik ataupun di pihak Belanda timbul kritik tajam terhadap persetujuan yang telah tercapai. Di Negeri Belanda kecaman muncul terutama dari partai-partai Kristen Protestan dan dari VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie = Partai Rakyat untuk Kemerdekaan dan Demokrasi), bahkan partai pemerintah seperti Partai Rakyat Katolik (KVP) ada keraguan tentang keefektifan politik Persetujuan Linggarjati. Di Indonesia sendiri kecaman pedas muncul dari pihak PNI dan Masyumi.¹⁴

Belum satu hari, tindak tanduk Pemerintah Belanda membuat rusaknya kepercayaan rakyat Indonesia dengan menduduki Bogor pada tanggal 16 November 1946. Tentara KNIL dibawah Leeneman mengadakan penahanan-penahanan di kalangan rakyat, walaupun Mr. Mohamad Roem yang segera menemui tentara Inggris, berhasil memulihkan pemerintahan sipil di Bogor dengan bantuan Lord Killearn dan delegasi Belanda sehingga rusaknya kepercayaan rakyat atas perjanjian Linggarjati.¹⁵

3. Perundingan Renville

Dua perundingan yang telah dilangsungkan dalam waktu yang lama dan melelahkan ternyata menemui kegagalan. Dari perundingan

¹⁴ Ide Anak Agung Gde Agung. *Renville*. Jakarta :Penerbit SinarMas,1983, hlm.35

¹⁵ Tobing,K.M.L, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, Gunung Agung:Jakarta,1986,hlm.1

Hoge Veluwe sampai perundingan Linggarjati tidak membawa hasil. Perundingan yang dicita-citakan tidak tercapai meskipun Belanda dan Indonesia sudah saling setuju semua isi yang tertuang dalam perjanjian. Kegagalan perundingan di atas, memaksa Belanda untuk melakukan serangan Agresi Militer I terhadap Indonesia sebagai bentuk protes macetnya diplomasi. Serangan Belanda tersebut mengakibatkan situasi politik semakin mempersulit kedua belah pihak untuk mencapai kompromi dengan penyelesaian dalam meja perundingan.

Agresi Militer I berlangsung pada tanggal 20 Juli sampai 4 Agustus 1947. Peristiwa tersebut menarik perhatian pihak ketiga seperti Dewan Keamanan PBB dan Australia. Dewan Keamanan PBB yang diundang bersidang oleh Australia menerima suatu resolusi yang menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk menghentikan permusuhan. Dalam Dewan Keamanan Resolusi Australia, didukung oleh Tiongkok, dan diterima oleh sebagian besar mayoritas suara. Dewan Keamanan mengajukan dibentuknya Komisi Tiga Negara untuk segera menyelesaikan konflik. Agresi militer sangat membahayakan bagi Belanda-Indonesia, keduanya sepakat perang harus segera dihentikan.¹⁶ Hadirnya Dewan Keamanan PBB di tengah berkecamuknya Agresi Militer Belanda dirasa sangat membahayakan kedudukan Belanda di mata dunia internasional.

¹⁶ D.Sidik Suraputro,*Revolusi Indonesia Dan Hukum Internasional*.UI Press:Jakarta. hlm.102

Hal ini disadari oleh Duta Besar Belanda di PBB yaitu Mr. E.N. Van Kleffens. Sebagai pemimpin delegasi Belanda dalam perdebatannya di Dewan Keamanan. Jika agresi tidak dihentikan Dewan Keamanan PBB akan mengucilkan negeri Belanda dalam menyelesaikan persoalannya dengan Indonesia. Penghentian agresi militer di Indonesia didukung oleh Duta Besar Van Rijen. Dalam sidang kabinet pada tanggal 4 September 1947 telah menyadarkan Van Mook untuk menghentikan agresi militer yang akan ia lanjuti. Campur tangan Dewan Keamanan dalam persoalan Indonesia akan menjadi kekalahan politik bagi Belanda.⁹ Belanda sangat menentang adanya campur tangan tersebut. Menurut Duta Besar Van Kleffens persoalan Indonesia adalah urusan dalam negeri Belanda sendiri. Akan tetapi bagi Indonesia hal di atas merupakan suatu keuntungan. Indonesia dapat menyelesaikan persoalannya dengan Belanda. Selain itu peristiwa agresi militer telah di cap buruk oleh negara Australia, AS, Tiongkok, dan Mesir. Keempat negara tersebut sangat menentang agresi militer Belanda dan telah memberikan dukungannya kepada Indonesia. Negara Mesir yang ikut campur dalam persoalan Indonesia menyerukan permusuhan terhadap negeri Belanda, karena pemerintah Mesir menganggap tindakan Belanda di atas merupakan ancaman terhadap perdamaian dunia. Kekhawatiran pemerintah Mesir akhirnya dituangkan dalam suatu Aide Memoire oleh raja Farouq yang kemudian diserahkan kepada perwakilan Belanda.

Pemerintah Mesir telah mengakui kemerdekaan RI secara de jure dan telah mengakui adanya negara Indonesia seperti negara-negara Timur Tengah lainnya. Perundingan Linggarjati telah melibatkan campur tangan pihak ketiga, Aksi militer yang dilakukan Belanda dianggap suatu babak baru dalam masalah Indonesia, sehingga perlu melibatkan PBB, KTN dan negara-negara internasional, yang akan memegang peranan penting dalam menentukan dan menyelesaikan persoalan Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1947 Komisi Jenderal dibubarkan sebagai imbas dari Agresi Militer Belanda I. Meskipun bubar Belanda tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi perundingan selanjutnya yang akan terjadi setelah Agresi Militer I. Untuk kedua belah pihak masing-masing membentuk sebuah delegasi, Belanda membentuk delegasi pada tanggal 2 November 1947 dengan tujuan mempersiapkan diri untuk Komisi Tiga Negara dan RI, sedangkan Indonesia sudah membentuk delegasi pada tanggal 22 September 1947 tetapi pada bulan Oktober ditambah lagi dengan menghadirkan wakil-wakil Sumatra seperti Dahlan Jambek dan Nasrun sebagai Gubernur Sumatra Barat.

Komisi Tiga Negara yang juga disebut Komisi Jasa-Jasa Baik, tiba di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1947. Dengan demikian secara tidak resmi merupakan kemenangan Indonesia bahwa PBB telah mengakui secara de facto dengan mengirimkan komisi untuk mengadakan perundingan. Dalam hari-hari pertama Komisi Tiga Negara berusaha mengenal dan memahami persoalan yang harus dihadapi dalam

perundingan. Berdasarkan keputusan Dewan Keamanan PBB, Komisi Tiga Negara menggunakan Jasa-Jasa Komisi para Konsul dan Peninjau Peninjau militer untuk menyusun laporan yang akan disampaikan atau diterima Dewan Keamanan pada tanggal 14 Oktober 1947. Sebelum pelaksanaan perundingan, Komisi Tiga Negara juga ditugaskan untuk menentukan tempat perundingan. Sesuai dengan keinginan Republik sebab Republik tidak bersedia mengadakan pertemuan dengan Belanda di Yogyakarta atau di Jakarta, hanya bersedia mengadakan di suatu tempat netral. Komisi Tiga Negara berusaha menentukan tempat tersebut dan ditemukanlah sebuah kapal milik Amerika. Dalam hal ini Amerika merupakan pendukung dalam penyelesaian persoalan Indonesia. Kapal milik Amerika “US Renville” digunakan sebagai tempat perundingan antara Belanda-Indonesia. Perundingan tersebut mengenai arti gencatan senjata agar dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Pertemuan yang diadakan di atas kapal “US Renville” disebut dengan perundingan Renville dan dibuka secara resmi pada tanggal 8 Desember 1947 di bawah pimpinan Herremans wakil Belgia dalam Komisi Tiga Negara.

Kehadiran Dewan Keamanan PBB dan KTN sebagai penengah dalam perundingan antara Belanda-Indonesia akhirnya mencapai suatu hasil yaitu persetujuan Renville. Pada tanggal 17 Januari 1948 persetujuan tersebut berhasil ditandatangani oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi Belanda. Saat dilaksanakannya perundingan Renville, kabinet Indonesia sudah mengalami pergantian di mana kabinet Syahrir jatuh

untuk kedua kalinya dan digantikan dengan kabinet baru. Presiden Soekarno menunjuk Amir Sjarifoeddin sebagai formatur kabinet. Amir Sjarifoeddin berhasil menyusun suatu kabinet baru dengan partai Masyumi dan PNI sebagai inti. Akan tetapi kabinet Amir tidak bertahan lama, seminggu setelah ditandatanganinya persetujuan Renville, kabinet Amir Sjarifoeddin pada tanggal 23 Januari 1948 telah mengundurkan diri. Kebijakan kabinet Amir menerima persetujuan Renville sangat merugikan Indonesia dan hasilnya pun ditolak oleh KNIP. Selain itu partai-partai yang tergabung dalam kabinetnya tidak menyetujui persetujuan gencatan senjata dan kebijakan yang dijalankannya. Partai-partai tersebut seperti Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet sedangkan PNI menuntut suatu pergantian potofolio. Sejak itu Amir dan kabinetnya harus mengembalikan mandat dan jatuh. Presiden Soekarno segera menugasi wakil presiden Hatta untuk membentuk kabinet baru.

Hatta berhasil membentuk kabinet baru, para menterinya berasal dari kabinet Amir seperti: anggota-anggota Masyumi, PNI, PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia), Parkindo (partai Kristen Indonesia), dan FDR (Front Demokrasi Rakyat) bekas sayap kiri. Hatta yang menjadi pimpinan kabinet siap ditugaskan dalam perundingan Renville. Terbentuknya kabinet Hatta merupakan tahap baru perundingan-perundingan antara negeri Belanda dan Republik Indonesia. Pokok-pokok terpenting di dalam program kabinet Hatta ialah melanjutkan perundingan-perundingan atas dasar perundingan Renville dan langkah-langkah yang

menuju Negara Indonesia Serikat.¹⁷ Hatta merasa optimis dengan harapan-harapannya dalam melanjutkan perundingan. Perundingan sangat bergantung dari sikap Belanda-Indonesia dalam menafsirkan asas-asas politik persetujuan Renville. Perundingan selanjutnya merupakan penentu bagi kelanjutan jalannya penyelesaian persoalan Indonesia.

Akan tetapi perundingan mengalami kemacetan, Republik Indonesia mengalami kesulitan ekonomi di dalam negeri. Hal ini karena Belanda melakukan blokade ekonommi yang sebenarnya bertentangan dengan persetujuan Renville untuk melemahkan kekuatan Republik. Selain itu ini kedudukan Republik Indonesia dipersulit karena daerah RI sudah dikurangi dengan daerah-daerah yang banyak memberi penghasilan. Karena kondisi yang demikian, perundingan yang dijalankan oleh kabinet Hatta beserta menteri D. U. Stikker dari Belanda tidak membawa hasil dengan tidak menemui kata sepakat. Sebagai akibatnya meletuslah aksi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 September 1948.

Perundingan resmi antara delegasi Belanda dan delegasi Indonesia yang dimulai dari tahun 1946-1948 tidak membawa hasil. Kegagalan disebabkan lamanya proses perundingan karena berbagai masalah dalam negeri, keinginan untuk menyelesaikan konflik tidak terwujud. Kekecewaan sangat dirasakan karena usul-usul dalam perundingan yang telah diajukan tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing negara. Pertentangan antara Belanda-Indonesia tidak dapat dihindari karena setiap

¹⁷ D.Sidik Suraputra.*op.cit*.hlm.105

usul dalam perundingan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat di dalam negerinya masing-masing. Awal terjadinya pertempuran bermula dari pihak Belanda yang selalu ingin memaksakan kehendaknya untuk menguasai semua pulau di Indonesia. Pertempuran diciptakan Belanda dengan selalu mengingkari butir-butir persetujuan berdasarkan alasan yang dibuat buat untuk membenarkan terjadinya agresi militer, Belanda juga membatalkan persetujuan secara sepihak. Mengambil kembali kebebasan, menyerang Republik Indonesia dengan berbagai alat perang modern untuk mengusai sebagian wilayah Indonesia secara cepat.

Serangan yang dilancarkan Belanda terhadap Indonesia disebut dengan Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948. Buah dari gagalnya perundingan Renville. Tujuan Agresi Militer II untuk menundukan Republik Indonesia. Belanda beranggapan bahwa perundingan terlalu lama tanpa hasil yang menguntungkan. Pada Agresi Militer II Belanda berhasil menduduki ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta. Berhasil pula menangkap Presiden Republik Indonesia Soekarno-Hatta dan pemimpin-pemimpin lainnya. Belanda menganggap Republik Indonesia sudah tidak ada lagi.

Reaksi-reaksi di luar negeri tidak menguntungkan pemerintah Belanda, negara-negara Arab dan negara-negara Asia yang baru merdeka, tidak menyetujui. Dunia internasional banyak yang mengutuk aksi militer Belanda itu. Australia malah mendesak PBB memberi sanksi keras

kepada Belanda. Perdana Menteri India, Nehru, mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi di New Delhi. Mengundang negara-negara Arab, negara-negara Asia Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara. Mereka merundingkan langkah-langkah apa yang akan di ambil untuk menentang aksi militer Belanda tersebut.

Dari 20 sampai dengan 24 Januari 1949, wakil-wakil dari Afghanistan, Australia, Burma, Srilanka, Mesir, India, Iran, Irak, Lebanon, Pakistan, Filipina, Arab Saudi, Syiria, dan Yaman berkumpul di New Delhi. Negara-negara itu di bawah pimpinan Nehru merundingkan masalah Indonesia. Tiongkok, Nepal, New Zealand dan Thailand mengutus peninjau ke konfrensi itu. Negara-negara yang hadir dalam konferensi New Delhi menyatakan simpatinya terhadap perjuangan Republik Indonesia dalam menghadapi aksi militer Belanda II. Mereka menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan masalah Indonesia. Seruan ini diterima, oleh Dewan Keamanan PBB dijadikan sebagai resolusi. Resolusi yang isinya memberikan dukungan kepada Indonesia, resolusi tersebut sangat menguntungkan pihak Indonesia secara tidak langsung posisi Belanda pun semakin sulit.

Dewan Keamanan PBB yang membicarakan rencana resolusi di sponsori oleh Amerika, Tiongkok, Norwegia, dan Kuba mendapat reaksi keras dari Belanda. Pemerintah Belanda Van Roijen menentang rencana resolusi tersebut karena dianggap membahayakan kedudukan Belanda. Meskipun Belanda menentang resolusi tersebut, sidang yang

membicarakan masalah resolusi tetap akan dibahas oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949. Wakil Amerika, Prof. Philip C. Jessup ditugaskan untuk menjelaskan isi resolusi. Setelah dipaparkan panjang lebar, rencana resolusi tersebut banyak yang mendukung, tetapi juga banyak yang menolak. Namun utusan negara-negara yang berpihak mendukung Indonesia lebih banyak daripada yang mendukung Belanda. Peristiwa ini merupakan peristiwa bersejarah bagi Indonesia sebagai negara yang baru saja berdiri.¹⁸

Hasil Resolusi yang telah disetujui Dewan Keamanan PBB diserahkan kepada Republik Indonesia pada tanggal 23 Maret 1949. Dewan Keamanan PBB pun mengeluarkan suatu “Ruling” atau semacam keputusan yang bertujuan memberikan bantuan kepada kedua belah pihak. Keputusan ini sesuai pasal 1 dan 2 dalam resolusi Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB juga akan membantu kedua belah pihak untuk melaksanakan secepat mungkin hasil perundingan KMB yang tertuang dalam resolusi DK tanggal 28 Januari 1949.

Dasar-dasar “Ruling” dapat diterima oleh kedua belah pihak. Akhirnya terbentuklah suatu permufakatan untuk mengadakan perundingan antara pihak Belanda dan Indonesia. Komisi PBB bertugas membantu kedua belah pihak untuk membicarakan syarat dan waktu penyelenggaraan KMB. Dalam perundingan KMB tersebut, yang akan menjadi wakil delegasi Belanda adalah Dr.H.J.Van Rijen seorang

¹⁸ Dr.A.H.Nasution,*Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Periode KMB*, Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung,Indonesia,hlm.90

diplomat Belanda. Sedangkan delegasi Indonesia diwakili Mohammad Roem sebagai ketua delegasi Indonesia. KMB juga dihadiri Merle H. Cochran sebagai wakil dari Amerika yang berpihak pada Indonesia.

Setelah dipersiapkan wakil-wakil dari setiap delegasi, perundingan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 April 1949. Perundingan berjalan sangat alot, Cochran sebagai penengah dalam perundingan yang sedang berlangsung. Cochran bertugas untuk mengarahkan kedua belah pihak melaksanakan pokok-pokok “ruling”. Inti pokoknya yaitu memperoleh kata sepakat antara kedua delegasi mengenai syarat-syarat dan waktu penyelenggaraan KMB. Belanda-Indonesia sepakat bahwa perundingan dikaitkan dengan pemulihan pemerintah Republik ke Yogyakarta. Sepakat membebaskan pemimpin-pemimpin RI dari tempat pengasingan di Bangka tanpa syarat.¹⁹

Cochran mengundang Moh. Hatta ke Jakarta untuk menghadiri perundingan agar dapat memberi masukan dan melancarkan perundingan pada tanggal 22 sampai dengan 29 April 1949. Dalam perundingan KMB tersebut, keberhasilan telah berpihak pada Indonesia. Van Roijen setuju bahwa Yogyakarta yang semula diduduki oleh Belanda dikembalikan kepada pemerintah Republik Indonesia, Van Roijen menyadari bahwa kekuasaan Belanda tidak dapat dipertahankan lagi di Indonesia. Akan tetapi, Van Roijen tetap mencoba menyelamatkan gagasan Belanda dalam KMB sebagai jalan akhir untuk menyelesaikan masalah Indonesia.

¹⁹. D.Sidik Suraputra.*op.cit*.hlm.165

Perundingan antara Van Roijen dan Moh. Roem menghasilkan suatu pernyataan. Naskah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta yang berada di Bangka. Naskah sejarah KMB tersebut dikenal dengan nama “Pernyataan Roem-Van Roijen, tanggal 7 Mei 1949”. Penandatanganan pernyataan Roem-Van Roijen tanggal 7 Mei 1949 menjadi bukti kemenangan politik Indonesia. Belanda berkewajiban menyerahkan kembali kedaulatan pemerintah Republik Indonesia.

4. Perundingan KMB

Kemenangan politik telah dicapai oleh pihak Indonesia melalui naskah pernyataan Roem-Roijen tanggal 7 Mei 1949. Hasil perjuangan diplomasi yang tidak sia-sia bagi bangsa Indonesia. Kemenangan yang diperoleh karena dari adanya campur tangan PBB, telah memberikan bantuannya untuk Indonesia dalam menyelesaikan masalah secara damai. Naskah pernyataan Roem-Roijen memberikan jalan menuju ke perundingan selanjutnya yang dilaksanakan dalam suatu Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Indonesia berharap perundingan yang dilanjutkan KMB diharapkan dapat memberi kemenangan politik, kemenangan yang telah lama dicita-citakan.²⁰

KMB di Den Haag dikenal dengan Konferensi Den Haag merupakan perundingan akhir untuk mewujudkan perdamaian antara kedua belah

²⁰IdeAnak Agung Gede Agung. *Pernyataan Rum-Van Roijen (Rum-Roijen Statement 7 Mei 1994)*. Yogyakarta:Yayasan Pustaka Nusatama dan UIPress.hlm. 91

pihak. Persiapan dilakukan oleh komisi PBB berdasarkan resolusi Dewan Keamanan. Inti Resolusi Dewan Keamanan PBB berbunyi bahwa komisi bermaksud mengundang wakil-wakil dari daerah-daerah lain diluar kekuasaan Republik Indonesia untuk turut serta dalam perundingan yang akan diadakan kemudian. Wakil-wakil ini mempunyai badan dan organisasi yang disebut dengan PMF (Pertemuan Musyawarah Federal) yaitu (BFO) yang diundang sebagai mitra dalam perundingan antara pihak Belanda dan Republik Indonesia. Perundingan itu dimaksudkan untuk membahas acara dan pokok-pokok yang akan dibicarakan dalam KMB. Sebelum dilaksanakannya KMB, Ide Anak Agung Gde Agung sebagai wakil dari PMF (BFO) Bijeekomst Federaal Overleg mengusulkan agar terlebih dahulukan musyawarah dengan presiden Soekarno dan wakil presiden Moh. Hatta di Yogyakarta atau di Jakarta. Musyawarah untuk mempersiapkan materi perundingan yang akan dilanjutkan pada KMB. Adapun yang akan menjadi bahan pembicaraan menyangkut soal garis-garis besar pembentukan tatanan hukum baru di Indonesia seperti:

- a. Azas-azas pokok UUDS RIS
- b. Azas-azas pokok piagam Uni Indonesia-Belanda
- c. Azas-azas pokok piagam penyerahan kedaulatan
- d. Masalah pertahanan
- e. Masalah ekonomi dan keuangan
- f. Masalah sosial dan budaya

g. Bentuk dan susunan oemerintahan negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat.

Persoalan di atas dijadikan sebagai pandangan bahwa Indonesia dan BFO adalah suatu bangsa yang tidak dapat dipisahkan oleh pemerintah Belanda. Hal ini merupakan gagasan dari Ide Anak Agung Gde Agung yang ternyata diterima oleh BFO dalam sidangnya pada tanggal 16 April 1949. Gagasan ini akan disidangkan melalui 2 tahap. Tahap pertama konferensi itu akan diadakan di Yogyakarta dari tanggal 19-22 Juli 1949, sedangkan tahap kedua akan diadakan di Jakarta dari tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 dan sekaligus penutupan secara resmi.

Pada konferensi di Yogyakarta yang bertindak sebagai tuan rumah adalah Republik Indonesia. Pada konferensi di Jakarta yang akan bertindak sebagai tuan rumah adalah BFO. Kedua tahap sidang yang akan dijalankan akhirnya berhasil mencapai pandangan yang sama mengenai masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam KMB. Konferensi Inter-Indonesia di atas yang telah berhasil mencapai kesepakatan bersama pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dengan keberhasilan tersebut, diadakanlah KMB di Sgravanhage, Den Haag, Belanda. KMB bertujuan untuk membicarkan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam konferensi di Indonesia.²¹ Wakil-wakil yang hadir dalam KMB yakni Indonesia dipimpin Moh. Hatta, Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen, UNCI (United Nations Committee on Indonesia) atau utusan

²¹ Dr.A.H.Nasution,*Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Periode KMB*, Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung,Indonesia,hlm.245

Dewan Keamanan PBB diwakili oleh Chritchley dan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II.

Sidang KMB secara resmi dibuka oleh DR.W. Drees (Perdana Menteri Belanda). Pihak-pihak yang turut serta dalam KMB berjanji untuk berusaha KMB dapat dilangsungkan dan dimulai pada tanggal sebelum 1 Agustus 1949 dan dapat diselesaikan dalam 2 bulan berikut. Pembukaan sidang paripurna pertama KMB, pada tanggal 23 Agustus 1949 oleh Perdana Menteri Belanda Drs.Willem Drees yang telah dipilih menjadi ketua sidang atas nama kerajaan Belanda yang bertindak selaku tuan rumah. Konferensi telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang sangat berarti bagi Indonesia. Dalam KMB dibahas semua masalah dari semua aspek pemerintahan yang bertalian dengan pembentukan negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Hal ini seperti tercantum dalam memorandum KMB 22 Juni 1949. Para anggora berusaha agar persetujuan-persetujuan yang disepakati KMB dalam waktu 2 bulan mendatang dapat diklasifikasi oleh masing-masing pihak. Dalam waktu 6 minggu berikutnya, penyerahan kedaulatan negara Indonesia Serikat dapat dilakukan sebelum Januari tahun 1950.²²

Perundingan KMB pertama telah menghasilkan 3 hal kesepakatan yakni :

(1) Menyusun suatu konstitusi sementara untuk negara Indonesia Serikat,

²² Dr.A.H.Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Periode KMB*, Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung,Indonesia,hlm.249

- (2) Persetujuan tentang penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat dan
- (3) Ketentuan-ketentuan yang menyangkut serah terima jabatan-jabatan pemerintah, hak dan kewajiban dari pemerintah Indonesia (Hindia Belanda) kepada negara Indonesia Serikat.

Hal tersebut merupakan suatu penegasan bahwa penyerahan kedaulatan Indonesia sesuai dengan dasar-dasar persetujuan Renville. Selain itu, diterapkan dasar-dasar kerjasama dalam Uni yang akan diadakan antara Belanda dan Indonesia berdasarkan kesamaan hak dan derajat dilakukan secara sukarela.

Perdana Menteri Belanda Drs. Willem Drees berharap pada KMB mendatang, konferensi harus berhasil secara material dan formal.²³ Secara formal konferensi sudah disebut berhasil. Konverensi dianggap berhasil jika sebuah persetujuan sudah dapat disepakati oleh semua pihak secara patut dan adil. Sedangkan secara material konferensi hanya dapat diakui berhasil, jikalau persetujuan-persetujuan yang dicapai memmengaruhi pengembangan hubungan baik antara Indonesia-Belanda. Akhirnya menteri/ketua delegasi Belanda menegaskan, bahwa tujuan pokok KMB adalah menyerahkan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat demi perdamaian bangsa-bangsa yang terlibat di dalamnya. Menurut Tom Critchley, sebagai ketua UNCI mengharapkan KMB yang dirintis dengan

²³ K.M.L Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, Jakarta : Gunung Agung, 1986, hlm. 23-24

susah payah mencapai hasil yang akan mampu meletakkan dasar-dasar yang kukuh bagi persekutuan Belanda dan Indonesia.

Dasar-dasar tersebut yakni:

- (1) pengembalian RI ke Yogyakarta.
- (2) Persetujuan mengenai dasar-dasar KMB dan.
- (3) Gencatan senjata.

Ketiga tahap tersebut dilakukan dengan baik. Dalam tiga tahap di atas UNCI bertindak sebagai pemrakarsa, tetapi setelah perundingan dimulai di Den Haag. Kedua belah pihak akan langsung mengetengahkan dan membela kepentingan masing-masing, UNCI akan membatasi diri pada kedudukan sebagai pengamat. UNCI sangat yakin, bahwa bangsa Belanda dan Indonesia saling membutuhkan. Belanda dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki yang sangat dibutuhkan RIS dalam pembangunan negara serikat yang baru. Pada pihak lain semangat dan kegairahan yang dimiliki bangsa Indonesia untuk segera memantapkan kemerdekaannya. Jika dua kekuatan itu dapat dipersatukan dalam satu kerjasama yang sepadan pasti akan membawa pengaruh positif, tidak hanya pada pembangunan dalam negeri, tetapi juga pada hubungan-hubungan Internasional.²⁴

Dalam praktiknya semua persetujuan yang telah sekian kali ditandatangi kandas karena selalu terbentur pada soal perincian penyerahan kedaulatan. Dalam hal ini, masa peralihan selalu menjadi

²⁴ Dr.A.H.Nasution,*Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Period KMB*,Disjaraah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung,Indonesia,hlm.98

pertengkaran yang tidak ada ujungnya. Belanda selalu berpendapat bahwa pada masa peralihan, segala kedaulatan masih penuh berada di tangan Belanda. Pihak Indonesia berkeinginan dalam masa peralihan. Indonesia sudah dimiliki warna yang jelas sebagai layaknya suatu negara merdeka oleh sebab itu Indonesia harus memiliki tanggung jawab yang penuh sebagai sebuah negara yang berdaulat. Akan tetapi karena konsepsi Indonesia ini tidak dapat disetujui oleh Belanda timbulah persengketaan. Sebanyak dua kali pertempuran terjadi antara Belanda dengan Indonesia. Satu-satunya cara untuk mengatasinya ialah, menyerahkan kedaulatan yang tidak bersyarat kepada Indonesia. Hal yang oleh kalangan bangsa Belanda pada masa akhir-akhir ini telah dianggap sebagai suatu konsekuensi yang tidak dapat dielakkan. Dengan demikian KMB dapat diakhiri dalam masa yang seingkat-singkatnya. Pada tanggal 2 November 1949 sidang penutup KMB dilangsungkan di Ridderzaal; Den Haag, tepat pukul 14.15 GMT. Sidang dihadiri menteri-menteri kabinet Drs. Willem Drees, ketua-ketua fraksi dalam dewan perwakilan Belanda, anggota-anggota senat Belanda, dan wakil-wakil diplomatik.²⁵

Sidang yang diketuai oleh Drs. Willem Drees diharapkan semua permasalahan sudah mendapat kejelasan dan penyelesaian sebaik mungkin. Sebagai hasilnya ketua delegasi Indonesia Moh. Hatta menyatakan rasa syukur atas tercapainya persetujuan. Beliau mengungkapkan dalam pidato sambutannya. Konferensi yang sudah

²⁵ K.M.L.Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renvile*. Gunung Agung:Jakarta,1986.hlm.23 s.d.24

berjalan lebih dari dua bulan di akhiri dengan baik. Namun belum semua persoalan dapat diselesaikan dalam KMB terutama masalah Papua yang masih merupakan suatu permasalahan.²⁶

Selanjutnya Hatta menggambarkan kegembiraannya di kalangan bangsa Indonesia bahwa pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia sudah berakhir, telah lahir pemerintah baru berdasarkan Pancasila. Sehingga dunia Internasional mengakui dasar negara yang baru lahir itu. Pengakuan secara resmi di dapatkan oleh bangsa Indonesia, akhirnya sidang paripurna KMB selama kurang lebih 2 bulan tercapailah persetujuan. Adapun sebagai hasil utamanya adalah:

- a. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949 dan juga mengenai masalah keuangan, ekonomi, budaya, dan lain-lain.
- b. Masalah Irian Barat karena belum dicapai kesepakatan ditunda sampai 1 tahun lamanya.
- c. Khususnya bidang militer akan dibentuk APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dengan tentara nasional Indonesia sebagai inti pembubaran KNIL.
- d. (Koninklijk Nederlands Indië Leger) dan pasukan bekas anggota KNIL ke dalam APRIS, adanya suatu misi militer Belanda di Indonesia untuk

²⁶ Dr.A.H.Nasution,*Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Period KMB*,Disjolah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung,Indonesia,hlm.189

membentuk melatih APRIS dan pemulangan Angkatan KL (Koninklijke Leger) dan KM (Koninklijke Marine) ke negeri Belanda.²⁷

Perundingan akhir antara Indonesia dengan Belanda mencapai sebuah kesepakatan bersama dalam sebuah perundingan yang akan sama-sama dihormati dalam sebuah persetujuan kesepahaman. Sebagai hasilnya Belanda akhirnya meninggalkan tanah air Indonesia dan menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia. Indonesia mendapatkan pengakuan de facto dan de jure dari Belanda dan dunia Internasional pada tanggal 27 Desember 1949.

Upacara Penyerahan Kedaulatan, berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949 di dua tempat, yaitu di Amsterdam dan di Jakarta. Atas nama RIS Perdana Menteri Hatta menerimanya di Amsterdam dari Ratu Juliana. Pada kesempatan ini Ratu Juliana antara lain berkata, bahwa " kini kita tidak lagi berdiri berhadapan satu sama lain, melainkan berdiri sejajar, meskipun masih penuh dengan penderitaan dan tanda-tanda luka."²⁸ Di Jakarta penyerahan kekuasaan dilakukan oleh WTM Lovink kepada Sultan Hamengku Buwono IX selaku wakil Perdana Menteri RIS.

Walaupun demikian perjuangan Republik terus berjalan, dalam waktu yang singkat negara warisan Van Mook dan Republik Indonesia ditegakkan meliputi daerah-daerah Indonesia yang telah dikembalikan oleh Belanda. Perjuangan belum berakhir karena Irian belum kembali

²⁷ *Ibid.hlm.175.*

²⁸ Dr.A.H.Nasution,*Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Periode KMB*,Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung,Indonesia,hlm.396

kepada Indonesia. Akan tetapi betapa gembiranya seluruh rakyat ketika pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda dengan resmi menyerahkan kedaulatannya atas Indonesia dan kegembiraan pula pada saat tanggal 17 Agustus 1950 RIS menjadi Republik Indonesia. Tanggal 28 Desember Presiden Sukarno dan rombongan bertolak belakang dengan dua pesawat istimewa ke Jakarta. Beliau diantar dari lapangan udara Maguwo, Presiden Sukarno dan rombongan sampai di Jakarta pukul 11.40, disambut oleh Wakil PM Hamangku Buwono IX beserta rakyat bersorak gembira.²⁹

²⁹ Dr.A.H.Nasution,*Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Periode KMB*,Disjara-AD dan Penerbit Angkasa Bandung,Indonesia,hlm.397